

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGELOLAAN WISATA RELIGI IKAN LARANGAN LUBUK LANDUR KABUPATEN PASAMAN BARAT MENURUT PERSPEKTIS ISLAM

Mulia Vandini^{1*}, Gusril Basir²

¹Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

E-mail: dmulia358@gmail.com¹, gusrilbasir@gmail.com²

ABSTRACT

The role of the Government in the management of the Lubuk Landur Prohibited Fish Religious Tourism in West Pasaman Regency highlights the importance of the government's role in motivating the community and the private sector to participate in the development of religious tourism destinations. The management of religious tourism requires a significant role of the government, especially in the implementation of DSN/MUI fatwa Number 108/DSN/MUI/X/2016. This management is based on sharia principles that lead to public benefits, cleanliness, nature preservation, worship facilities that meet sharia requirements, and avoidance from prohibited acts such as immorality, adultery, and drugs. West Pasaman has interesting tourism potential such as prohibited fish tourism, which is part of the tradition of the Minangkabau people. However, there was a decrease in tourist visits in 2019 in Lubuk Lundur, due to the lack of trust in the private sector in the role of the government in the management of religious tourism. This causes tourists to violate Islamic sharia rules, triggers distrust in the private sector, and the lack of cooperation with the government and the Lubuk Landur nagari government in the management of prohibited fish religious tourism shows efforts to embrace the private sector, empower the community, and establish cooperation. Despite the obstacles in direction and control, the nagari government has shown positive developments. Through the role of coordinators, facilitators, regulators, motivators. The purpose of this study is to analyze the role of the nagari government in the management of religious tourism of prohibited lubuk landur fish in West Pasaman Regency according to an Islamic perspective using qualitative methods. The results of this study show that the role of the nagari government affects the management of religious tourism of fish prohibited in Lubuk Landur West Pasaman Regency according to the Islamic perspective. The role of the government coordinator aims to embrace the community in development, the role of the facilitator to create conducive conditions, the role of the stimulator to create a strategy for tourist attractions, and the role of the motivator to ensure the continuity of the tourism business. Thus, the role of the Lubuk Landur nagari government in the management of prohibited fish religious tourism shows success in embracing all components of society, empowering local potential, and maintaining the sustainability of religious tourism in accordance with Islamic sharia principles.

Keywords: Role, Government, Management, Religious Tourism

ABSTRAK

Peran Pemerintah dalam pengelolaan Wisata Religi Ikan Larangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata religi. Pengelolaan wisata religi membutuhkan peran pemerintah yang signifikan, terutama dalam implementasi fatwa DSN/MUI Nomor 108/DSN/MUI/X/2016. Pengelolaan ini

didasarkan pada prinsip syariah yang mengarah pada kemaslahatan umum, kebersihan, kelestarian alam, fasilitas ibadah yang memenuhi syarat syariah, serta penghindaran dari perbuatan terlarang seperti maksiat, zina, dan narkoba. Pasaman Barat memiliki potensi wisata yang menarik seperti wisata ikan larangan, yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Minangkabau. Namun, terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2019 di Lubuk Lundur, akibat kurangnya kepercayaan pihak swasta terhadap peran pemerintah dalam pengelolaan wisata religi. Hal ini menyebabkan wisatawan melanggar aturan syariat Islam, memicu ketidakpercayaan pihak swasta, dan kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Peran pemerintah nagari Lubuk Landur dalam pengelolaan wisata religi ikan larangan menunjukkan upaya merangkul pihak swasta, memberdayakan masyarakat, dan menjalin kerjasama. Meskipun terdapat kendala dalam pengarah dan pengendalian, pemerintah nagari telah menunjukkan perkembangan yang positif. Melalui peran koordinator, fasilitator, regulator, motivator. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana peran pemerintah nagari dalam pengelolaan wisata religi ikan larangan lubuk landur kabupaten pasaman barat menurut perspektif islam dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peran pemerintah nagari memengaruhi pengelolaan wisata religi ikan larangan lubuk landur kabupaten pasaman barat menurut perspektif islam. Peran Koordinator pemerintah bertujuan untuk merangkul masyarakat dalam pembangunan, peran fasilitator menciptakan kondisi kondusif, peran stimulator menciptakan strategi objek wisata, dan peran motivator memastikan kelangsungan usaha pariwisata. Dengan demikian, Peran Pemerintah Nagari Lubuk Landur Dalam Pengelolaan Wisata ikan larangan menunjukkan kesuksesan dalam merangkul semua komponen masyarakat, memberdayakan potensi lokal, dan menjaga keberlangsungan wisata religi sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kata kunci: *Peran, Pemerintah, Pengelolaan, Wisata Religi*

1. Pendahuluan

Pariwisata ialah pangkal energi alam ataupun ciptaan yang diatur dengan bagus alhasil menciptakan sesuatu destinasi yang menarik turis buat bertamu. Perihal ini hendak menciptakan akibat yang baik untuk independensi wilayah (PAD), paling utama untuk warga dekat.

Buat menghasilkan pengurusan yang baik, wajib mengaitkan pihak- pihak yang terpaut serta berkaitan langsung dengan bumi pariwisata semacam penguasa, warga, turis.

Kemampuan darmawisata yang terdapat di area Pasaman Barat semacam darmawisata telaga besar, darmawisata tepi laut sasak, darmawisata air bangis serta darmawisata ikan pantangan, dengan terdapatnya kedudukan penguasa serta pemahaman warga darmawisata Sumatera Barat bertumbuh dengan cepat.

Darmawisata Religi ialah tipe darmawisata yang tujuannyaenuhi keinginan rohani orang serta menguatkan kepercayaan, dengan menghadiri bermacam tempat yang dikira selaku mempunyai keimanan (religius). Darmawisata religi salah satu destinasi yang banyak peminatnya di golongan warga Sumatra Barat disebabkan darmawisata ini ucap pula dengan darmawisata agama atau darmawisata kunjungan. Darmawisata religi mayoritas berhubungan dengan bermacam dengan adat istiadat agama atau keyakinan warga.

Dalam pengurusan darmawisata religi kedudukan penguasa amatlah diperlukan oleh sebab itu pengurusan darmawisata religi berdasarkan pada ajaran badan syariah nasional no 108 atau DSN atau MUI atau X atau 2016. Kalau determinasi hukum hal prinsip penajaan pariwisata bersumber pada prinsip syariah cocok dengan determinasi terpaut destinasi darmawisata harus ditunjukkan pada ikhtiar buat menciptakan faedah biasa serta menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Destinasi darmawisata harus mempunyai sarana ibadah yang pantas digunakan serta gampang dijangkau, serta penuhi ketentuan syariah. Destinasi darmawisata harus bebas dari Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, serta gambling.

Pasaman Barat mempunyai kesempatan dalam pengembangan bermacam destinasi darmawisata kemampuan serta menarik atensi semacam darmawisata ikan pantangan. Ikan pantangan ialah suatu metodologi warga minangkabau mengenai ikan yang dilarang buat dibekuk, dipancing atau dikonsumsi cocok dengan perjanjian warga pada waktu kemudian. Dahulu ikan- ikan ini diberi unduhan sejenis ilmu teluh, supaya tidak dicuri, bila terdapat yang mencurinya hendak memperoleh penyakit apalagi dapat menimbulkan kematian, dengan mempunyai perairan bengawan yang amat besar serta bagus penguasa Pasaman Barat menggunakan kemampuan itu dengan membuka destinasi darmawisata. Ada pula ikan pantangan yang terdapat di Pasaman Barat selaku berikut:

Tabel 1.1
Wisata Ikan Larangan Yang Ada Di Kabupaten Pasaman Barat

No	Ikan larangan	Lokasi
1.	Ikan Larangan Selambau	Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
2.	Ikan larangan masjid Nurul Huda jorong kartini	Muara Kiwai, Kec. Gn. Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
3.	Wisata ikan larangan kajai	Kajai, Kec. Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
4.	Wisata Religius Ikan Larangan Lubuak Landua	Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat
5.	Ikan larangan lubuak bumun	Lubuk anau, kecamatan kinali kab. Pasaman barat

Sumber data: wawancara awal dengan bapak Hendrizal selaku kapid kebudayaan dinas pariwisata pasaman barat

Bersumber pada bagan diatas bahwasannya Pasaman Barat diketahui dengan perairan bengawan yang amat besar sampai penguasa Pasaman Barat mempunyai peluang buat mengatur subjek darmawisata dahulu kala dengan membuka darmawisata ikan pantangan salah satu darmawisata ikan pantangan yang terdapat di Pasaman Barat terletak di wilayah Aur Kuning Kecamatan Pasaman disitu ada Darmawisata Religi Ikan

Pantangan Lubuk Landur tetapi diamati dari pengembangan saat ini darmawisata ikan pantangan ini telah terus menjadi tidak terpelihara.

Surau Lubuk Landur senantiasa marak didatangi oleh musafir yang kembali desa ke Pasaman Barat, tidak tertinggal masyarakat lokal serta para turis luar juga berdatangan ke posisi darmawisata ini. Tidak hanya buat melancong, pula terdapat yang berkunjung ke kuburan Bapak Lubuk Landur, serta tidak sedikit pula pengunjung memohon berkah di kuburan itu. Tidak hanya itu, Lubuk Landur pula diketahui hingga ke manca negeri selaku subjek darmawisata Ikan pantangan religius. Bisa diamati dari kenyataan alun- alun dan dari informasi biro pariwisata Pasaman Barat tingkatan kunjungan turis di darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur selaku berikut:

Tabel 1.2
Tingkat kunjungan wisatawan di wisata religi
ikan larangan lubuk landur

No	Tahun	Jumlah wisatawan
1.	2017	7.440
2.	2018	7.845
3.	2019	3.874
4.	2020	8.068
5.	2021	10.980
6.	2022	11.479

Sumber data Data kunjungan Dinas Pariwisata Pasaman Barat

Diamati dari bagan 2. 1 diatas sebenarnya kunjungan turis pada darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur mengalami kenaikan tiap tahun, hendak namun Pada tahun 2019 mulai terlihatnya penyusutan yang mana bisa diamati dari situasi darmawisata ikan pantangan lubuk Landur karena kurang nya keyakinan pihak pengelola swasta kepada kedudukan penguasa mengenai pengurusan darmawisata religi. Alhasil banyak nya turis yang cocok dengan syariat islam perihal ini menyebabkan banyaknya turis yang bertamu berpasang- pasangan (belum halal).

Kebijaksanaan penguasa wilayah amat berarti dalam mensupport kesuksesan pengembangan pariwisata. Berarti buat membenarkan kalau perkembangan pariwisata berjalan dengan bagus serta terencana. Pengurusan subjek darmawisata yang bagus hendak membagikan donasi yang besar untuk area itu. Penguasa pula mempunyai kedudukan berarti dalam zona pariwisata, semacam mengiklankan pariwisata, tingkatkan mutu jasa serta produk darmawisata, serta meningkatkan kawasan- kawasan pariwisata terkini, paling utama di area timur Indonesia. Tidak hanya itu, penguasa pula butuh tingkatkan mutu pangkal energi orang di aspek kepariwisataan serta melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan.

2. Metode Penelitian

Riset ini memakai motode kualitatif deskriptif. Tata cara kualitatif merupakan motode riset yang dipakai buat mempelajari pada situasi subjek yang alami dimana periset selaku intrumen kunci. Posisi riset dicoba disalah satu Rezim Nagari Lubuk

Landur Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Durasi riset diawali dari April 2024 hingga Mei 2024.

Dalam riset ini didapat 2 tipe pangkal informasi ialah informasi pokok serta informasi skunder. Informasi awal ialah informasi primer

yang ialah hasil tanya jawab dari Ayah Rilvi Handani, S. Pd (Orang tua Nagari), Ayah Tori Mardianto (Jorong Lubuk Lnadur), Emak Datuak Amiruddin (Kepala Figur Warga), Ayah Anto (Pimpinan Anak muda), Ayah Satra (Pengelola Darmawisata Ikan Pantangan Lubuk Landur), Rika Elista (Turis Ikan Pantangan Lubuk Landur). Serta informasi yang kedua memakai informasi skunder ialah informasi dari novel, hasil pandangan para pakar, serta pangkal yang lain. Metode pengumpulan informasi yang dicoba oleh periset serupa dengan pangkal informasi pokok, ialah dengan melaksanakan tanya jawab, pemantauan, serta pemilihan. Metode pengumpulan informasi disini periset memakai tanya jawab, pemantauan, serta pemilihan.

Analisa informasi merupakan cara analitis buat menciptakan serta menata informasi yang didapat dari tanya jawab, memo alun- alun, serta pemilihan. Ini mengaitkan pengelompokan informasi ke dalam jenis, menjabarkannya ke dalam item, menatanya ke dalam pola, serta memilah informasi berarti buat dipelajari. Tujuannya merupakan buat membuat kesimpulan yang gampang dimengerti oleh seluruh orang. Analisa informasi diawali dengan pengumpulan informasi, dilanjutkan dengan editing, pengurangan, pengelompokan, penyajian informasi, serta terakhir pencabutan kesimpulan

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil riset yang sudah dicoba berhubungan dengan bermacam filosofi selaku selanjutnya: ketua, penyedia, stimulator, motivator. Filosofi pengurusan pariwisata ialah kedudukan penguasa dalam Pengurusan Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat bagi perspektif islam. Hasil riset ini bisa didapat lewat pemantauan, tanya jawab serta pemilihan.

1. Koordinator

Ketua penguasa nagari bermaksud buat bisa menaruh kebijaksanaan ataupun strategi untuk pembangunan wilayah serta merangkul seluruh bagian warga buat jadi bintang film penting dalam pembangunan. Peng Ketua kedudukan penguasa dalam pengurusan darmawisata ialah:

a. *Planning*

Menolong menata konsep serta strategi buat menggapai tujuan dari sesuatu badan. Pemograman sendiri setelah itu jadi guna penting serta sangat berarti dalam penerapan aktivitas manajemen. Hasil hasil tanya jawab riset alun- alun bagi Rilvi Handani Selaku Orang tua Nagari Perencanaan Lubuk Landur

“ penguasa wilayah serta penguasa nagari pasaman barat telah didesain pada tahun ini (2024) buat melaksanakan ataupun melangsungkan pembinaan spesial buat pengelola bagus itu pihak swasta serta warga

setempat supaya tercapainya tujuan pengembangan serta pengurusan destinasi Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat.”

Hasil tanya jawab riset alun- alun bagi ayah Tori Mardianto berlaku seperti jorong lubuk landur:“ pada medio tahun 2023 penguasa telah melangsungkan pembinaan mengenai pengurusan serta pengembangan darmawisata ini pada kepengurusan destinasi darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur yang ikut serta badan kepemudaan desa, golongan siuman darmawisata, serta niniak mamak desa hendak namun sedang butuh diadakannya ulasan lebih lanjut buat pengembangan serta pengurusan darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur”

b. *Directing* (Memusatkan)

Directing mempunyai maksud selaku aksi yang bermaksud buat memusatkan seluruh aktivitas serta pula metode berasumsi dari badan badan buat dapat menggapai tujuan badan itu. buat advis yang jalani penguasa begitu juga hasil tanya jawab oleh periset ke pada Rilvi Handani Berlaku seperti Orang tua Nagari Lubuk Landur ialah”

“ Kurang nya keyakinan ataupun agama kepada penguasa buat pengurusan bersama destinasi darmawisata ini sebab pihak pengelola swasta sedang mempunyai agama kalau bila pihak penguasa turut dan dalam pengurusan darmawisata ini lenyap karakteristik khas di darmawisata religi di darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur ini”

c. *Organizing* (Tercantum Coordinating)

ialah guna manajemen Dalam perihal penjatahan kewajiban bagus itu buat aktivitas besar ataupun aktivitas kecil serta dicocokkan dengan kemampuan tiap- tiap. Pada pengorganisasian ini penguasa nagari pula membuat sebagian badan buat pengurusan serta pengembangan darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur ini begitu juga dibilang salah satu gerai warga serta pula selaku Emak Datuak Amiruddin berkata:

“ Di Nagari Lubuk Landur ini memanglah telah dibentuknya sebagian badan yang turut ikut serta pada pengurusan serta pengembangan darmawisata yang terdapat dinagari lubuk landur paling utama pada Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur. Badan yang telah dibangun terdapat 2 ialah: golongan siuman darmawisata, badan kepemudaan.”

d. *Controlling* (pengawasan)

Manajemen dapat jadi alat ataupun pembuka jalur buat mengatur penerapan kewajiban dari badan sesuatu badan (pegawai industri. Pengawasan pengembangan serta pengurusan wisat religi ikan pantangan lubuk landur dicoba tiap akhir tahun oleh penguasa wilayah yang lazim dicoba oleh biro pariwisata pasaman barat serta buat pengawasan lebih lanjut dicoba oleh penguasa nagari yang mana dicoba lewat menyurpe

posisi darmawisata serta tingkatan kunjungan darmawisata, begitu juga hasil tanya jawab periset dengan satra berlaku seperti pihak penjamin jawab pengelola di tingkatan penguasa daerah

“ Pihak penguasa melaksanakan pengawasan di tiap tahunnya yang umumnya pengawasan ini diamati dari seberapa tingkatan kunjungan darmawisata religi pada tahun 2018 tingkatan kunjungan darmawisata berjalan dengan bagus tingkatan kunjungannya tiap tahun nya bertambah sehabis datangnya covid serta pada tahun inilah mulai berkurangnya pengurusan perihal ini diakibatkan oleh timbulnya antipati kegiatan serupa dari pihak pengelola swasta perihal ini pula salah satu pemicu terhentinya pembangunan jembatan layang sarana darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur.”

2. Fasiliator

Penguasa berfungsi selaku penyedia dalam menghasilkan situasi yang mendukung untuk penerapan pembangunan wilayah. Selaku penyedia, penguasa beranjak di aspek ajudan lewat penataran pembibitan, pembinaan, pembelajaran serta kenaikan keahlian dan aspek pendanaan ataupun investasi pada warga yang diberdayakan.

Buat sarana yang telah diserahkan oleh penguasa wilayah pasaman barat buat Subjek Darmawisata Religi Ikan Pantangan periset mewawancari salah satu turis yang bertamu ke subjek darmawisata Rika Elista selaku selanjutnya:

“ Darmawisata Religi Ikan Pantangan amatlah baik ditambah dengan ikan pantangan nya yang besar- besar hendak namun kita tidak memperoleh tempat bersandar ataupun gubuk di dekat bengawan ikan mencegah itu ini disebabkan sedikit nya tempat bersandar ataupun gubuk yang diadakan. Dikala bertamu kita pula bisa perihal yang tidak bagus ialah saat sebelum menghuni tempat bersandar kita di perintah terlebih dulu buat membeli jualana orang dagang itu”

Penguasa membagikan dorongan pembangunan jembatan layang dikawasan subjek darmawisata religi ikan pantangan, tetapi anggaran pembangunan yang diterima oleh rezim itu kurang alhasil menyebabkan terhentinya kegiatan pembangunan sedangkan hingga anggaran yang diajukan sair serta jembatan layang itu berakhir dibentuk.

Fakta pembangunan jembatan layang itu pada langkah pondasi serta lantai dan ikatan calo jembatan layang belum dapat direalisasikan semacam diucap oleh Orang tua Perencanaan Lubuk Landur:

“ Pada tahun 2017 pembangunan jembatan layang di zona bengawan ikan pantangan lubuk landur, tetapi pembangunan itu terdesak wajib diberhentikan sebab kekurangan anggaran dari penguasa wilayah buat sedangkan hingga anggaran dicairkan balik buat pembangunan lanjut. Dengan pembangunan tahun 2017 terkini hingga pondasi akhir ke akhir melintas sungai”

3. Stimulator

Bagi Blakely, stimulator merupakan penguasa menghasilkan strategi buat pembangunan subjek serta energi raih darmawisata. Bersumber pada hasil pemantauan serta tanya jawab kedudukan penguasa pada pengurusan darmawisata religi ikan pantangan Lubuk Landur. Buat filosofi stimulator kedudukan penguasa nagari dalam pengurusan darmawisata religi penguasa hendak merujuk pada alas syariat islam yang mana pada Buat di filosofi stimulator kedudukan penguasa nagari dalam pengurusan darmawisata religi penguasa dapat merujuk pada alas syariat islam yang mana pada ajaran badan syariah nasional no 108 atau DSN atau MUI atau X atau 2016. Buat perihal ini tanya jawab periset dengan Rilvi Handani berlaku seperti orang tua nagari perencanaan Lubuk Landur selaku selanjutnya;

“ buat pengurusan berikutnya kita dari penguasa nagari telah akur buat melaksanakan pengurusan darmawisata ini lebih membidik lagi ke pengurusan darmawisata religi yang sesungguhnya, dengan merujuk pada syariat islam ialah ajaran badan syariah nasional no 108 atau DSN atau MUI atau X atau 2016. Perihal ini pula insyallah hendak lebih mendesak lagi keyakinan pengelola swasta pada penguasa nagari.”

4. Motivator

Penguasa mempunyai kedudukan berarti dalam mendesak kemajuan pariwisata. Mereka wajib memotivasi penanam modal, warga, serta wiraswasta di aspek pariwisata supaya lalu mensupport serta berkontribusi pada perkembangan zona ini. Tanpa dorongan serta sokongan yang kokoh, pengembangan pariwisata tidak hendak berjalan dengan bagus. pengelola swasta serta warga darmawisata biar terdorong buat pengembangan Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur. Begitu juga yang data yang diterima oleh periset dikala tanya jawab dengan Penguasa Nagari Lubuk Landur selaku selanjutnya:

“ Bahwsanya penguasa nagari lubuk landur memotivator dengan penanam modal, warga serta pengelola swasta supaya terlibatnya pada Pengembangan darmawisata religi ikan pantangan Lubuk Landur oleh pengelola swasta serta warga setempat belum berjalan bagus. Perihal ini bisa diamati dari kemajuan posisi darmawisata yang kurang yang dicoba penguasa nagari. Minimnya aktivitas upaya serta pengurusan dari pihak ketiga, dan ikatan dengan pihak ketiga, disebabkan perhitungan yang terbatas, alhasil berakibat dengan minimnya sarana yang diadakan oleh penguasa Nagari Lubuk Landur. Sedikitnya pembinaan serta kotentang pengurusan darmawisata dengan pihak ketiga, hendak jadi halangan pihak ketiga buat terdorong meningkatkan darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur.”

Bersumber pada riset yang sudah dicoba, kedudukan Penguasa Nagari Lubuk Landur dalam memotivasi warga buat turut dalam pengurusan darmawisata religi ikan pantangan Lubuk Landur yang dicoba darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur yang dicoba dengan bermacam usaha kayaknya: merangkul pihak swasta

kepada pengurusan darmawisata buat menghasilkan bagian penting dalam pembangunan serta mengecoh warga yang bermukim disekitar subjek darmawisata ikan pantangan tanpa pemungutan bayaran, pula pihak penguasa nagari telah berusaha buat menjalankan kerjasama dengan pihak pengelola swasta bisa diamati dari pengekoordinator, penyedia, stimulator, serta motivator cuma saja pihak pengelola swasta sedang belum percaya kepada pihak penguasa nagari lubuk landur takutnya lenyap ataupun pudarnya karakteristik khas dari destinasi darmawisata religi ini.

Pengembangan pada pengurusan darmawisata religi darmawisata lewat perencanaan, pengorganisasian, penerapan, serta pengaturan yang jalani oleh penguasa nagari lubuk landur membuktikan pengurusan yang kemajuan dengan bagus di nagari lubuk landur walaupun ada hambatan yang sedang kurang perihal dalam perihal directing ataupun advis dari penguasa alhasil perlunya advis lebih lanjut semacam membagikan pembinaan kepada pengelola darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur, berikan sokongan kepada pembangunan darmawisata serta pula lebih mencermati lagi hambatan pemograman serta penerapan pada pengurusan darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur.

5. Kesimpulan

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba oleh periset mengenai kedudukan penguasa nagari dalam Pengurusan Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur Kabupaten Pasaman Barat bisa disimpulkan kalau terdapatnya kedudukan penguasa ketua, penyedia, stimulator, motivator darmawisata ikan pantangan lubuk landur kabupaten pasaman barat serta membuktikan pengerjaan yang bagus kepada darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur kedudukan yang yang dicoba oleh penguasa nagari selaku selanjutnya:

1. Koordinator

Penguasa nagari mempunyai kedudukan berarti dalam pengembangan pariwisata. Mereka berfungsi selaku ketua buat memadukan seluruh bagian warga dalam pembangunan. Penguasa nagari pula berfungsi selaku penyedia dalam menghasilkan situasi yang mendukung buat pengembangan wilayah. Mereka membagikan penataran pembibitan, pembinaan, pembelajaran, serta pendanaan pada warga buat tingkatan keahlian serta pemberdayaan mereka di aspek pariwisata.

2. Fasiliator

Biro pariwisata Pasaman Barat bertanggung jawab menyediakan warga dalam pengurusan pariwisata cocok dengan keinginan yang dibutuhkan dalam perihal alat serta infrastruktur yang mensupport daya guna program ataupun aktivitas. Memandang penguasa wilayah membagikan dorongan anggaran buat pembangunan fasilitas- fasilitas cagak subjek darmawisata semacam tempat serta meja bersandar yang dibentuk selama pinggirang bengawan tempat darmawisata religi ikan pantangan itu. Tidak hanya itu penguasa membagikan bantuan

3. Stimulator

Bagi Blakely Stimulator merupakan penguasa menghasilkan strategi buat pembangunan subjek serta energi raih darmawisata. Bersumber pada hasil pemantauan serta tanya jawab kedudukan penguasa pada pengurusan darmawisata religi ikan pantangan lubuk landur

Penguasa berfungsi selaku stimulator dalam pengembangan subjek energi raih darmawisata, penguasa mendesak seluruh pihak yang ikut serta buat kesertaan dalam pengembangan subjek darmawisata. Penguasa nagari pula melaksanakan pembinaan pada warga yang diberdayakan di subjek darmawisata supaya senantiasa kekal serta menarik hari para wisatawan. Rezim nagari lubuk landur suda mengaitkan pihak swasta dalam pengurusan darmawisata, salah satu pihak swasta yang ikut serta pada pengurusan darmawisata ini merupakan Owner Darmawisata Religi Ikan Pantangan Lubuk Landur. Penguasa berfungsi selaku motivator buat memotivasi seluruh pengelola kebutuhan buat ikut serta dalam pengembangan subjek energi raih darmawisata. Penguasa nagari pula melaksanakan pembinaan pada warga yang diberdayakan di subjek darmawisata supaya senantiasa kekal serta menarik batin para turis yang bertamu. Tetapi disisi lain penguasa nagari Lubuk Landur telah mengaitkan pihak swasta dalam pengurusan darmawisata, salah satu pihak swasta yang ikut serta pada pengurusan darmawisata ini merupakan owner darmawisata religi ikan pantangan Lubuk Landur.

4. Motivator

Dalam pembangunan pariwisata kedudukan penguasa selaku motivator dibutuhkan supaya tiap upaya pariwisata lalu berjalan. Penanam modal, warga dan wiraswasta dibidang pariwisata ialah target penting yang butuh buat lalu diserahkan dorongan supaya kemajuan pariwisata bisa berjalan dengan bagus. Tidak dibantah kalau cara pengurusan serta pengembangan pariwisata tidak bebas dari sokongan warga atau wiraswasta di aspek pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Defia Riski Anggarini, ' Akibat Zona Pariwisata Pada Perkembangan Ekonomi Wilayah Lampung',
Harian Bidang usaha Darmajaya, 7. 2 (2021), 116–22<https: atau atau kekasih. org
atau 10. 30873 atau jbd. v7i2. 3089

Helmi Aliansyah and Wawan Hermawan, ' Kedudukan Zona Pariwisata Pada Perkembangan
Ekonomi Kabupaten atau Kota Di Jawa Barat', Bina Ekonomi, 23. 1 (2021), 39–
55<https: atau atau kekasih. org atau 10. 26593 atau be. v23i1. 4654. 39- 55

Ajaran DSN MUI Mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber pada Prinsip Syariah Tafsirq.
Com'<https: atau atau tafsirq. com atau ajaran atau dsn- mui atau pedoman-
penyelenggaraan- pariwisata- berdasarkan- prinsip- syariah

- ARWANTO HARIMAS GINTING, Informasi Wardana, and Zainal Zainal, 'Strategi Penguasa Dalam Pengembangan Subjek Darmawisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar', *Harian Objektif Sarana Bhakti Praja*, 10. 1 (2020), 211–19<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jiwbp. v10i1. 874
- .
Suwari Akhmaddhian, 'Kedudukan Penguasa Wilayah DALAM Menciptakan HUTAN Pelestarian Bersumber pada Hukum No 41 TAHUN 1999 Mengenai KEHUTANAN (Riset Di Kabupaten Kuningan)', *Harian Gairah Hukum*, 3. 3 (2013), 446–56
- Dedy Suhendi, 'Kedudukan Dasar POLISI Pelindung PRAJA DALAM Penajaan Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa (Riset kepada Aplikasi Standar Operasional Metode Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)', *Harian Tatapamong*, 2019, 35–47<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jurnaltatapamong. v1i1. 1145
- . 2017
- Pandangan Kunia gadis serta trisna insan Noor, 'Analisa Kedudukan Penguasa', *Analisa Pemasukan Serta Tingkatan Keselamatan Rumah Tangga Orang tani*, 53. 9 (2017), 1689–99.
- Ayu Bakat and others, 'Analisa Usaha Penguasa Dalam Memencet Nilai Penggelapan Di Indonesia', *Harian Membela Negeri UPN Pensiunan Jakarta Pusat Amatan Membela Negeri UPN Pensiunan Jakarta*, 1. 1 (2023), 2023.
- Medi, 'Kedudukan Penguasa Wilayah Dalam Pengurusan Kemampuan Pariwisata Tersumbat Burake Di Kabupaten Tana Toraja'
- Ajaran DSN MUI Mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber pada Prinsip Syariah Tafsirq. Com'.
- Dedy Suhendi, 'Kedudukan Dasar POLISI Pelindung PRAJA DALAM Penajaan Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa (Riset kepada Aplikasi Standar Operasional Metode Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)', *Harian Tatapamong*, 2019, 35–47<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jurnaltatapamong. v1i1. 1145
- Defia Riski Anggarini, 'Akibat Zona Pariwisata Pada Perkembangan Ekonomi Wilayah Lampung', *Harian Bidang usaha Darmajaya*, 7. 2 (2021), 116–22<https: atau atau kekasih. org atau 10. 30873 atau jbd. v7i2. 3089
- .
Helmi Aliansyah and Wawan Hermawan, 'Kedudukan Zona Pariwisata Pada Perkembangan Ekonomi Kabupaten atau Kota Di Jawa Barat', *Bina Ekonomi*, 23. 1 (2021), 39–55<https: atau atau kekasih. org atau 10. 26593 atau be. v23i1. 4654. 39- 55
- .
Ajaran DSN MUI Mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber pada Prinsip Syariah Tafsirq. Com'<https: atau atau tafsirq. com atau ajaran atau dsn- mui atau pedoman- penyelenggaraan- pariwisata- berdasarkan- prinsip- syariah
- .
ARWANTO HARIMAS GINTING, Informasi Wardana, and Zainal Zainal, 'Strategi Penguasa Dalam Pengembangan Subjek Darmawisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar', *Harian Objektif Sarana Bhakti Praja*, 10. 1 (2020), 211–19<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jiwbp. v10i1. 874
- .

- Suwari Akhmaddhian, 'Kedudukan Penguasa Wilayah DALAM Menciptakan HUTAN Pelestarian Bersumber pada Hukum No 41 TAHUN 1999 Mengenai KEHUTANAN (Riset Di Kabupaten Kuningan)', *Harian Gairah Hukum*, 3. 3 (2013), 446–56
- Dedy Suhendi, 'Kedudukan Dasar POLISI Pelindung PRAJA DALAM Penajaan Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa (Riset kepada Aplikasi Standar Operasional Metode Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)', *Harian Tatapamong*, 2019, 35–47<<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jurnaltatapamong. v1i1. 1145
- . 2017
- Pandangan Kunia gadis serta trisna insan Noor, 'Analisa Kedudukan Penguasa', *Analisa Pemasukan Serta Tingkatan Keselamatan Rumah Tangga Orang tani*, 53. 9 (2017), 1689–99.
- Ayu Bakat and others, 'Analisa Usaha Penguasa Dalam Memencet Nilai Penggelapan Di Indonesia', *Harian Membela Negeri UPN Pensiunan Jakarta Pusat Amatan Membela Negeri UPN Pensiunan Jakarta*, 1. 1 (2023), 2023.
- Medi, 'Kedudukan Penguasa Wilayah Dalam Pengurusan Kemampuan Pariwisata Tersumbat Burake Di Kabupaten Tana Toraja'
- Ajaran DSN MUI Mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber pada Prinsip Syariah Tafsirq. Com'.
- Dedy Suhendi, 'Kedudukan Dasar POLISI Pelindung PRAJA DALAM Penajaan Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa (Riset kepada Aplikasi Standar Operasional Metode Keamanan Serta Kedisiplinan Biasa Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)', *Harian Tatapamong*, 2019, 35–47<<https: atau atau kekasih. org atau 10. 33701 atau jurnaltatapamong. v1i1. 1145>.